

BAB III

PEMBAHASAN

Didalam bab pembahasan ini akan dibahas mengenai bagaimana proses *agenda setting* Program Lasamba (Layanan Sambang Warga). Dengan mengacu pada definisi Operasional yang sudah dijelaskan didalam bab pertama, indikator-indikator yang akan diteliti didalam program Lasamba (Layanan Sambang Warga) antara lain : metode *agenda setting*, tehnik menyusun masalah prioritas publik, dan peroses didalam *agenda setting* dengan menggunakan *three stream theory*. Indikator-indikator pembahasan yang terkait :

A. Metode Agenda Setting

Didalam melakukan identifikasi masalah publik dalam proses *agenda setting* terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian didalam program Lasamba (Layanan Sambang Warga) metode yang digunakan adalah *quick decision analysis* Kepala Sub Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten Sleman menyatakan .

“ Untuk mempercepat proses mendapatkan data permasalahan secara cepat, tepat dan akurat sebagai “solusi antara “ Dinas Kabupaten Sleman melakukan analisis hasil dari kanal-kanal aduan masyarakat yang masuk ke Dinas Sosial kemudian dievaluasi untuk dilakukan input data kemudian dilakukan eksekusi sehingga masyarakat langsung mendapatkan solusi dari permasalahan, jadi Pemerintah Dinas Sosial melakukan Jemput Bola.

Metode *quick decision analysis* adalah menganalisa hasil evaluasi dengan menggunakan kriteria tertentu secara formal dari sebuah keputusan atau alternatif-alternatif yang telah ditetapkan. metode identifikasi masalah berhubungan dengan evaluasi rencana strategis/program kerja tahunan yang sebelumnya telah tertulis . program SLRT yang diluncurkan sebagai pembuka pintu gerbang permasalahan aduan masyarakat yang ditampung untuk selanjutnya dimasukkan didalam kanal-kanal untuk diberikan solusi permasalahan .

Didalam rapat FGD (Forum Grup Discussion) yang diadakan pada 26 september 2018 diadakan evaluasi dalam beberapa hal untuk memperbaiki sistem yang ada didalam Dinas Sosial Kabupaten Sleman dimana terdapat beberapa evaluasi yang harus dilakukan dalam bidang kinerja dan pelayanan Tim Penanggulangan :

1. Perlunya responsivitas yang cepat dan tanggap dalam menyelesaikan permasalahan yang masuk salam SLRT .
2. Untuk mengurangi angka kemiskinan ditahun 2021 sebanyak 8% ditahun 2021 di Kabupaten Sleman perlu dibentuk program kerja yang responsivitas.
3. Perlunya program solusi jemput bola dalam menyelesaikan permasalahan dengan membentuk tim khusus .
4. Program SLRT adalah program pasif, sehingga masyarakat yang harus aktif untuk melakukan pendataan agar Dinas Sosial mengetahui permasalahan yang ada diKabupaten Sleman

Untuk mendukung identifikasi permasalahan yang ada di Kabupaten Sleman dengan menggunakan hasil penelitian dan evaluasi dari program SLRT yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Beberapa diantaranya merupakan hasil kajian Dinas Sosial Kabupaten Sleman yang terkait dengan masalah kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan yang ada di Kabupaten Sleman dengan melakukan kajian terhadap evaluasi program terkait yang sudah berjalan sehingga dapat dihubungkan dengan program solusi antara yang akan menjembatani penyelesaian masalah masyarakat.

1. Focus Grup Discussion

FGD untuk melakukan identifikasi permasalahan di Kabupaten Sleman dilakukan pada saat rapat internal Dinas Sosial Kabupaten Sleman dan untuk menjawab tantangan dari Bupati Sleman dengan program yang cepat, tanggap, dan responsif dalam penanganan masalah dan aduan masyarakat segera mendapat solusi. Maka didalam rapat berdiskusi tentang usulan program kegiatan yang dapat mendukung untuk menyelesaikan masalah. Aduan dari masyarakat terkait dengan berbagai permasalahan masyarakat Kabupaten Sleman yang sudah diklasifikasikan didalam SLRT kemudian merujuk kepada proses responsivitas dan solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan penyelesaian permasalahan yang ada dibutuhkan sesuai dengan kanal- kanal yang sudah disediakan dan akan diberi solusi sesuai Dengan Dinas yang menangan permasalahan.

B. Teknik Menyusun Prioritas Masalah Publik dalam *agenda setting* program Lasamba (Layanan Sumbang Warga)

Didalam agenda setting proses penyusunan prioritas masalah publik merupakan suatu hal yang penting. Alternatif kebijakan yang dibuat untuk menyelesaikan masalah publik yang diprioritaskan agar mendapatkan perhatian lebih cepat dan responsif untuk diatasi dalam periode tertentu. Berdasarkan hasil penelitian, setelah ditemukan masalah identifikasi, selanjutnya untuk penyusunan masalah prioritas publik Pemerintah Dinas Sosial melakukan *forum Grup disussion* dengan stakeholer (dalam musrenbang RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2017-2022) yang diselaraskan dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Sleman “ meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat “ .

Bapak Sarastomo Ari Saptoto kepala seksi data kesejahteraan sosial Dinas Sosial Kabupaten Sleman menyatakan :

“ tahun 2016 untuk mengidentifikasi masalah sudah dikeluarkan kebijakan SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) yang berfungsi untuk mencatat meregistrasi aduan masyarakat didalam dokumen yang jelas yang kemudian akan diidentifikasi dan akan diberikan solusi “

Pembahasan prioritas masalah publik yang dibahas dalam Musrebang RPJMD Kabupaten Sleman tahun 2017-2022 kegiatan yan dilaksanakan di gedung graha sarina Vidi dengan tujuan untuk melakukan sinkronisasi dan menyelaraskan sasaran pembangunan jangka menengah daerah

yang strategis serta pembuatan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah, serta kebijakan umum yang selaras dengan visi dan misi Bupati Sleman.

Bapak Sarastomo Ari Saptoto kepala seksi data kesejahteraan sosial Dinas Sosial Kabupaten Sleman menyatakan :

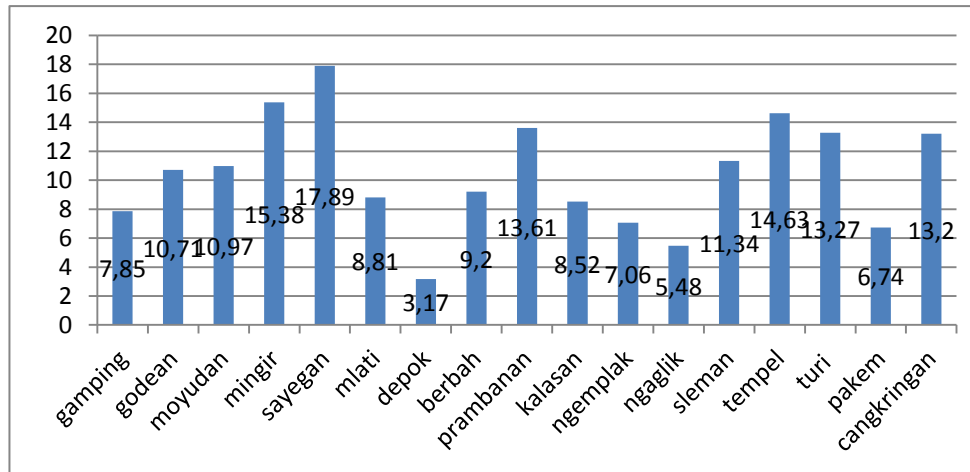
“ untuk menjawab tantangan dari Bupati Sleman diperlukan program kerja yang responsif dalam memproses dan memberikan solusi kepada masyarakat yang sudah terbuka dengan melaporkan kekanal-kanal media sosial ”

Berdasarkan hasil pembahasan dalam Musrenbang RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2017-2022 maka dapat dilihat hasil bahwa ada 20 prioritas masalah publik yang terdapat di Kabupaten Sleman yaitu :

1. Masalah Kemiskinan

Kemiskinan yang ada di Kabupaten Sleman yan terdapat dimasing-masing kecamatan dengan proporsi yang berbeda-beda dan tidak sama. Kecamatan dengan persentase penduduk miskin tinggi berada di Kecamatan Sayegan, Minggir, Tempel, Prambanan, Turi dan Cankringan sebagian besar adalah bagian pedesaan dengan persentase diatas 10%. Berikut merupakan data KK miskin menurut Kecamatan Kabupaten Sleman :

Gambar. 3
Distribusi KK miskin menurut Kecamatan Kabupaten Sleman Tahun 2017



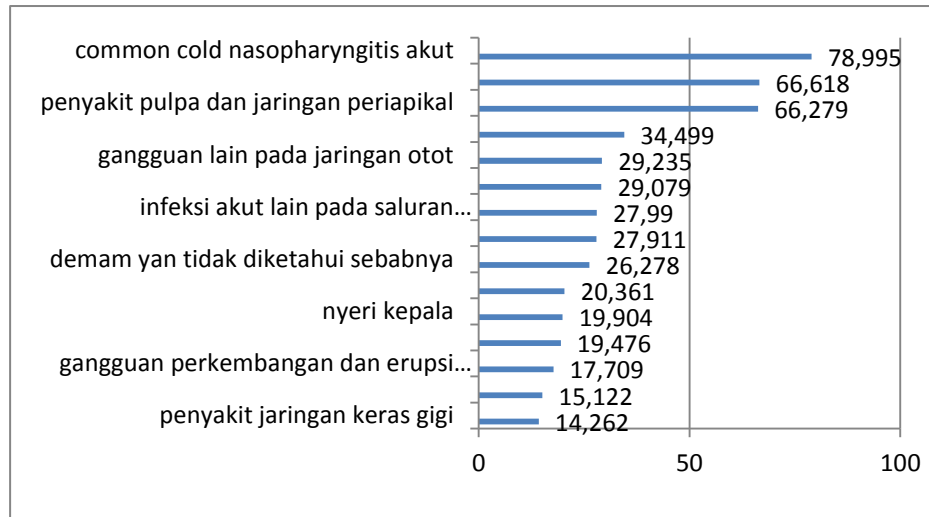
Sumber : Perda Nomor 6 Tahun 2019 RPJMD Kabupaten Sleman

2. Kesehatan

Program kesehatan di Kabupaten Sleman sudah banyak dicanankan namun sikap apatis dan kurangnya pengetahuan dari masyarakat di Kabupaten Sleman menyebabkan tidak optimal untuk program yang sudah ada .

berikut merupakan grafik data 10 penyakit besar di Kabupaten Sleman untuk semua kalangan usia dengan diagnosis terbanyak.

gambar. 4
Lima Belas Besar Penyakit Rawat Jalan Puskesmas Semua Golongan Tahun 2017



Sumber : <https://dinkes.slemankab.go.id>

3. Pendidikan

Untuk melakukan analisis kesejahteraan sosial dibidang pendidikan dilakukan terhadap indikator angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah.

- a. Angka partisipasi kasar (APK) adalah menunjukkan tingkat pasrtisipasi pendidikan penduduk secara umum. Indikator partisipasi disetiap jenjang pendidikan.
- b. Angka partisipasi murni (APM) adalah menunjukkan tingkat partisipasi sekolah usia penduduk ditingkat tertentu. Dengan indikator partisipasi disetiap jenang tertentu.
- c. Angka rata-rata lama sekolah

Years of schooling atau lamanya sekolah merupakan ukuran yang diakumulasikan dari investasi pendidikan individu.

d. Harapan lama sekolah

Harapan lamanya sekolah adalah lamanya tingkat pendidikan yang dirasakan anak usia tertentu dimasa yang akan datang.

Berikut merupakan data perkembangan angka rata-rata lama sekolah dan harapan dan harapan lama sekolah :

Gambar .5
Angka Partisipasi Kasar / Murni dan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sleman Tahun 2013-2018

| No | Uraian | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | APK SD/MI | 114,77 | 116,78 | 116,81 | 116,90 | 116,90 | 116,98 |
| 2 | APK SMP/MTS | 108,93 | 111,41 | 111,70 | 111,71 | 112,67 | 112,71 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 3 | APM SD/MI | 99,96 | 102,07 | 103,20 | 103,96 | 104,61 | 10,67 |
| 4 | APM SMP/MTS | 81,24 | 81,63 | 83,96 | 85,11 | 85,16 | 85,91 |
| 5 | ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH | 15,52 | 15,64 | 15,65 | 16,08 | 16,48 | n.a |
| 6 | RATA- RATA LAMA SEKOLAH | 10,03 | 10,28 | 10,28 | 10,64 | 10,65 | n.a |

Sumber : Perda Nomor 6 Tahun 2019 RPJMD Kabupaten Sleman

4. Pengelolaan informasi yang belum maksimal

Dilansir dari (<http://hukum.sleman.go.id>, 2018) terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan informasi di Kabupaten Sleman terkait dengan penggunaan dan pemberian fasilitas teknologi informasi belum optimal kepada seluruh perangkat daerah, penataan dan pengolahan arsip daerah ,serta pemanfaatan arsip yang belum diaudit secara maksimal.

5. Penataan Aparatur Pemerintahan Daerah belum optimal

Dilansir dari (<http://hukum.sleman.go.id>, 2018) terdapat beberapa permasalahan aparatur pemerintah yang ada di Kabupaten Sleman adalah dengan mengemban tugas sebagai pegawai yang belum sesuai dengan kompetensi SDM sehingga belum sepenuhnya berdasarkan pada keahlian dan kemampuan.

6. Masalah kesatuan bangsa dan politik

Dilansir dari (<http://hukum.sleman.go.id>, 2018), masalah kesatuan bangsa dan politik tidak hanya terjadi di dalam dunia nyata yang secara langsung dapat dilihat oleh mata secara langsung. Masalah kesatuan bangsa dan politik dapat terjadi juga di dalam dunia maya (*social media*). Dapat disimpulkan bahwa potensi pengendalian konflik di Kabupaten Sleman belum maksimal.

7. Pemenuhan kebutuhan produk hukum yang belum optimal

Dilansir dari (<http://hukum.sleman.go.id>, 2018) pemenuhan kuota produk hukum di Kabupaten Sleman terkendala dengan responsivitas yang terjadi antara perangkat daerah terdapat masalah daerah yang kompleks. Permasalahan lain yang terjadi adalah kekurangan back up data produk hukum (*soft file*) sehingga menyebabkan terkendalanya sosialisasi produk hukum ke masyarakat. Dapat dilihat dari data LAKIP bagian hukum setda

kabupaten sleman menunjukkan angka 7,37 persen tidak dapat diakses secara online karena tidak memiliki akses berbentuk soft file.

8. Tata pemerintahan yang baik dan bersih yang belum optimal

Belum optimalnya tata pemerintahan yang baik di Kabupaten sleman disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah perubahan regulasi yang berlangsung cepat , hubungan antara perangkat daerah dan unit kerja yang dihadapkan dengan kompleksitas untuk mencapai sinkronisasi kemudian dengan belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi dan lain-lain.

Dilansir dari (<http://hukum.sleman.go.id>, 2018) pengawasan interna didalam belum terkonsolidasi dengan jelas . selain itu inspektorat yang bertugas sebagai pengawas internal belum optimal dalam melaksanakan tugasnya. Pada tahun 2015, sebanyak 2,99 persen dari sebesar 3 persen target persentase guna menurunkan angka dalam bentuk pelanggaran dan prosedur dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah Kabupaten Sleman sudah tercapai .sedangkan indikator yang tidak lanjut untuk hasil pemeriksaan ditargetkan sebanyak 88 persen dan berhasil terealisasi sebesar 95,09 persen . selain itu Kabupaten Sleman mendapat nilai *road maps* reformasi birokrasi sebesar 7,786 persen, pada tahun 2015 sementara dalam bidang area perubahan yang belum mencapai 100 adalah bidang penguatan pengawasan sebanyak 66,42 persen dalam bidang penataan sistem manajemen sebesar 5,83 persen .

9. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif .

hal seperti penciptaan daya tarik wisata, kualitas dan promosi . selain itu Kegiatan perekonomian di Kabupaten Sleman belum optimal didalam beberapa kemampuan sumber daya manusia didalam ekonomi kreatif sebagai pelaku ekonomi perlu ditingkatkan kembali.

Dilansir dari (<https://republika.co.id>, 2017), Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan kajian dan konsultasi dibidang ekonomi kreatif, sedangkan proses promosi industri ekonomi kreatif dilakukan oleh Dinas Pariwisata, untuk pembinaan dan pengembangan menjadi tugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi UKM tenaga kerja dan transmigrasi .

10. Perlu adanya peningkatan potensi Wisata

Salah satu potensi disleman adalah dibidang wisata adalah dengan adanya desa wisata dikabupaten sleman sendiri terdata dari 2016 terdapat 39 desa wisata (<https://republika.co.id>, 2017) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menginventarisir ada beberapa desa wisata di wilayah setempat yang saat ini kondisinya mati suri. desa wisata yang mati suri tersebut yakni Desa Wisata Rejosari di Kecamatan Cangkringan, Desa Wisata Pajangan di Kecamatan Sleman, Trumpon di Tempel, Bangunkerto dan Kembangarum

di Turi, Kaliurang Timur di Pakem), Mangunan di Berbah), serta Jantungan Sendari di Mlati.

11. Kemampuan bersaing pelaku perdagangan kecil masih relative rendah dibandingkan dengan pelaku perdagangan besar

Keberadaan pusat perbelanjaan modern yang ada disleman seperti sleman city hall dan mall besar yang terletak diSleman maupun yang dekat dengan sleman menjadi permasalahan tersendiri karena asar modern yang berkembang lebih pesat lebih diminati masyaraat karena menyediakan kebutuhan lengkap sehingga kondisi ini dapat mengancam pedagang kecil .(<https://www.antaraneews.com/>) melansir saat ini terdapat 203 toko modern berjejaring nasional dan hanya separuh yang mempunyai izin.

12. Masalah pencemaran sumber air

Dilansir dari (<https://jogja.tribunnews.com/>) , permasalahan pencemaran air yang dihadapi disleman yang diakibatkan oleh sampah domestik . pada tahun 2017 jumlah KK yang mendapat sanitasi layak mencapai96,07% dan meningkat 12,6 persen dibanding tahun 2016.

13. Kurangnya tenaga SDM dalam sistem Lapor Sleman

Dilansir dari (<https://jogjapolitan.harianjogja.com/>) , dikominfo memberikan salah satu program di Kabupaten Sleman yaitu dengan aplikasi lapor Sleman dan sudah melakukan sosialisasi melalui media massa, admin lapor Sleman resmi diluncurkan ditahun 2016 ntuk

mendukung Sleman sebagai kota Smart regency ditahun 2016 namun masalah kendala yaitu SDM yang hanya berjumlah dua orang PNS yang mengurus lapor Sleman dianggap kurang efektif untuk mengatasi laporan masyarakat terkait aduan berbagai macam permasalahan sosial .

14. Belum optimalnya pengawasan dalam izin investasi

Dilansir dari (<https://www.lapor.go.id//>) Di Kabupaten Sleman perusahaan yang akan melakukan penanaman modal di BPM adalah perusahaan yang memerlukan fasilitas untuk melakukan ekspor dan import (yang teridentifikasi menggunakan tenaga kerja asing) . sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar menggunakan hal tersebut wajin mendaftarkan perusahaan guna mengurus perizinan didaerah . di Kabupaten Sleman sendiri sudah terdapat Dinas Perzinan dan penanaman modal namun belum maksimal dalam menyelenggarakan pengawasan kegiatan investasi .

15. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih ada

Dilansir dari (<https://radarjogja.jawapos.com//>) Kasus kekerasan pada anak di Sleman masih tinggi. Bahkan pada 2018, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sleman mencatat ada 179 kasus. Dengan rata-rasa kekerasan mayoritas psikis kekerasan psikis melalui perkataan. Biasanya berupa olok-olok atau makian. Bahkan, ada

kasus penelantaran anak yang dilakukan orang tua. Lebih lanjut, kasus *klithih* yang marak terjadi juga disebabkan faktor keluarga. Perhatian orang tua terhadap anak kurang. Atau, niat *klithih* muncul akibat rasa tidak puas anak pada orang tua. Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIJ mengungkapkan bahwasannya jumlah kasus perundungan seksual kepada anak di DIJ masih sering dijumpai dengan rata-rata orang terdekat korban yang meakukannya.

16. Pengelolaah sampah belum maksimal

Dilansir dari (<https://jogja.tribunnews.com//>) Permasalahan sampah di Kabupaten Sleman sampai saat ini belum bisa diatasi secara maksimal dan tuntas . untuk penambahan tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse , Recycle (TPS 3R) yang menjadi program unggulan belum maksimal dikarenakan masyarakat d wilayah kota urung mengolah sampah secara mandiri dan sajah ini komposisi penyumbang sampah terbesar di Sleman antara masyarakat desa dan kota seimbang yakni 50 : 50 . sedangkan masalah sampah dalam sehari dapat mencapai 600 kubik . masalah sampah juga diakibatkan oleh penduduk yang membuang sampah secara sembarangan karena tidak bersedia ikut membayar iuaran truk pengangkut sampah .

17. Kualitas lingkungan hidup buruk

Dilansir dari (<https://jogja.tribunnews.com//>) kepala Dinas Lingkungan hidup mengungkapkan bahwa kualitas lingkungan hidup (KLH) di Sleman masih dibawah skor 60, artinya kualitas lingkungan hidup di Sleman masih Buruk, faktor utama dapat dilihat dari segi kualitas air yang buruk , tinggi akan bakteri e-coli , ketua forum komunitas sungai sleman (FKSS) menyatakan bahwa hampir semua titik sungai di Sleman mengalami pencemaran . menurut data DLH Sleman hampir semua kawasan pinggir sungai dijadikan pemukiman dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang tidak terpantau dengan baik .

18. Masalah tertib administrasi kependudukan dan kepadatan penduduk

Dokumen kependudukan seperti akta catata sipil masyarakat masih rendah, selain itu tingkat pertumbuhan Kabupaten Sleman semakin meningkat karena disebabkan masalah meningkatnya kasus pernikahan dini. Kepadatan juga disebabkan peningkatan jumlah imigrasi yang masu di Kabupaten Sleman . Menurut data dari Dinas Dukcapil Sleman, jumlah blanko siap cetak pertama kali di Kecamatan Gamping ada 573 keping. Jumlah ini akan bertambah dengan adanya pemohon KTP-el pengganti yang rusak dan mengajukan pembuatan KTP-el karena perubahan data. Penerbitan akta kematian masih sangat rendah karena data pelaporan kematian yang disampaikan ke Dinas Dukcapil jumlahnya sangat minim. Dalam kaitannya dengan data pemilih pemilu, penduduk yang sudah

meninggal dunia apabila belum diterbitkan akta kematiannya, namanya masih muncul di data pemilih. Hal ini terjadi karena Dinas Dukcapil tidak dapat menghapus data orang yang sudah meninggal dunia sebelum terbit akta kematiannya. Akibatnya data pemilih aktif menjadi tidak akurat (valid) karena data pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) masih muncul dalam data. Hal ini akan menyulitkan penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan jumlah surat suara yang akan disediakan .

19. Jumlah RTH (Ruang Terbuka Hijau) jauh dari standar

Dilansir dari (<http://hukum.sleman.go.id>, 2016) Luasan ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan di Kabupaten Sleman masih jauh dari standar lingkungan hidup. Pasalnya saat ini luasan RTH perkotaan di kabupaten setempat hanya mencapai 20 persen dari total wilayah perkotaan yang ada. Luas wilayah perkotaan Sleman mencapai 14.701 hektar. Sementara RTH perkotaan hanya 588,93 hektar atau 20 persen. Padahal standarnya, luas RTH harus 30 persen . RTH perkotaan yang ada saat ini terdiri dari lima macam peruntukkan. Antara lain habitat liar atau sempadan sungai seluas 335,5 hektare, taman kota 4,17 hektare, lapangan olah raga 68,36 hektare, area pemakanan 93,68 hektare, dan koridor atau sempadan jalan 87,22 hektare. luasan RTH perkotaan yang masih terbatas, Pemkab Sleman melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2016 mewajibkan seluruh desa untuk membuka RTH baru. Adapun luasan RTH yang diwajibkan bagi masing-masing desa adalah 20 persen dari total luas desa.

20. Kerusakan infrastruktur jalan

Dilansir dari (<http://hukum.sleman.go.id>, 2016) kepala seksi pengaduan , komunikasi dan informatika (Diskominfo) sleman rastruktur terut insfmenjelaskan aduan terkait kerusakan insfrastruktur jalan masih mendominasi hingga 40 persen . Sekitar 16,91 kilometer jalan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam kondisi rusak berat. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Binamarga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUP-KP) Kabupaten Sleman Achmad Subhan di Sleman . dalam kondisi rusak berat tersebut turun sekitar 4,05 kilometer dibandingkan data 2016 yang tercatat 20,96 kilometer . jika dibandingkan total panjang jalan Kabupaten di Sleman sepanjang 699,5 kilometer, ruas jalan yang rusak berat tersebut hanya 2,42 persen. Adapun panjang jalan yang rusak sedang mencapai 70,22km atau 10,04 persen atau naik 4,40 kilometer dibandingkan tahun 2017 sepanjang 66,82km atau 9,55 persen .

Setelah 20 macam permasalahan tersebut diatas dikalsifikasikan kemudian dilakukan pembahasan penentuan prioritas masalah publik melalui FGD dan hasil analisis data , dengan menyelaraskan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati “ meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat “

berdasarkan proses yang telah dilalui , maka hasil yang didapatkan bahwa pemmasalahan yang menjadi prioritas adalah sebagai berikut :

1. Kemiskinan
2. Kesehatan
3. Pendidikan
4. Pembangunan wilayah dan peningkatan sarana prasarana (infrastruktur)
5. Tata ruang kota dan lingkungan hidup
6. Kinerja aparatur sipil negara dan birokrasi

Masalah publik yang akan menjadi prioritas dalam kesejahteraan sosial dalam proyek pembangunan Kabupaten Sleman dibidang sosial salah satunya adalah penuntasan masalah kemiskinan, kesehatan dan pendidikan dan dikerucutkan lagi menjadi masalah kemiskinan karena didalam masalah kemiskinan tersebut menjadi hal pokok untuk manusia karena menyangkut 3 hal penting yaitu sandang,pangan, dan papan . Bapak Sarastomo Ari Saptoto kepala seksi data kesejahteraan sosial Dinas Sosial Kabupaten Sleman menyatakan :

“ 3 masalah penting yang ada didalam masalah kemiskinan, pendidikan dan kesehatan akan dikerucutkan kedalam masalah kemiskinan yang akan ditanggulangi karena ketika permasalahan kemiskinan merupakan keadaan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, jika seseorang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan bebas dari kemiskinan maka akan berkembang dan berpengaruh keberbagai sektor “

Dengan demikian kemiskinan akan menjadi agenda publik untuk mewujudkan *sleman smart regency* pada tahun 2021 untuk menurunkan

kemiskinan sebesar 8%, karena masalah kemiskinan adalah masalah yang akan berdampak kepada hampir semua sektor jika tidak dapat diselesaikan .

C. Proses Agenda Setting Program Lasamba (Layanan Sumbang Warga)

Berdasarkan *Three Stream Theory* .

Didalam analisis pengambilan keputusan kebijakan publik , John Kingdon menggunakan pendekatan baru yang terkenal dengan sebutan *three stream theory*, yaitu sebagai berikut :

1. Problem Stream

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemetaan masalah di Kabupaten Sleman dilakukan dengan cara Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). 20 permasalahan besar yang ada di Kabupaten Sleman kemudian diklasifikasikan menjadi Tiga permasalahan besar yang didapatkan dari musrenbang adalah permasalahan kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan. Kemudian dijadikan isu strategis menjadi kemiskinan Hal yang menjadi sorotan terutama dalam aspek penanggulangan masalah yang membutuhkan respon yang cepat, tanggap, dan solutif. Dan untuk merumuskan alternatif guna menyelesaikan masalah kemiskinan yang ada di Kabupaten Sleman . Bapak Sarastomo Ari Saptoto kepala seksi data kesejahteraan sosial Dinas Sosial Kabupaten Sleman menyatakan :

“semua aspirasi masyarakat tidak hanya masuk dan ditampung dalam pintu gerbang yang bernama SLRT , maka diperlukan penanganan yang reponsive dan solutive, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama permasalahan dalam pemberian bantuan yang tidak harus dilakukan dengan sistem yang rumit, artinya disini dapat memecah arus birokrasi” .

Guna mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman “ meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat ” . maka point penting dalam penuntasan dalam penyelesaian permasalahan di Kabupaten Sleman dengan aksi yang sigap menjadi penting . ketika masyarakat sudah mendapat solusi yang dan penanganan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan maka pemerintah akan lebih mudah dalam masuk kesektor pembangunan selanjutnya guna memprioritaskan isu-isu yang ada dimasyarakat .

a. Kemiskinan merupakan isu strategis

Kemiskinan adalah isu strategis karena didalam kemiskinan terdapat indikator hal dasar manusia untuk hidup layak diukur dari sandang, papan , pangan . agar manusia dapat hidup layak serta mempunyai martabat maka hal-hal dasar ini harus dipenuhi . pengentasan masalah kemiskinan di Kabupaten Sleman perlu dilakukan dengan cepat, tanggap dan sigap .untuk menurunkan angka kemiskinan perlu dengan adanya sinergi dan keaktifan dari pemerintah dalam menangani permasalahan masyarakat . SLRT sudah menjadi pintu gerbang dan kanal-kanal pengelompokan masalah masyarakat maka dari itu untuk segera menemukan solusi dan responsivitas dari Pemerintah

diperlukan program yang dapat secara tanggap dan cepat dalam merespon permasalahan masyarakat .

- b. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman yang tinggi akan tetapi angka ratio gini juga tinggi.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman tahun 2016 menurut BPS adalah sebesar 5,25% dapat dilihat bahwa angka tersebut lebih tinggi dari DIY kecuali didalam tahun 2017 yang berada diangka 5,26% . ada faktor yang mempengaruhinya salah satunya karena ada pembangunan bandara di Kulon progo yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi berkembang dengan pesat . akan tetapi perkembangan ini tidak diikuti dengan angka ratio gini. Ditahun 2016 Kabupaten Sleman berada diangka 0,39% yang berarti Kabupaten Sleman berada di ketimangan moderat (Agustin, 2018) . angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi diikuti dengan indeks gini yang tinggi manandakan bahwa uang yang beredar di Kabupaten Sleman tidak sampai kepada masyarakat dengan 40% pendapatan yang rendah .

Dikabupaten Sleman sendiri ketimpangan disebabkan oleh faktor yang cenderung mempengaruhi kualitas pekerjaan , yaitu kurang terampil dalam suatu pekerjaan sehingga

menyebabkan orang akan berada dalam posisi sulit untuk naik kelas sosial . kondisi seperti ini akan berdampak pada produktivits dan upah yang rendah dan berdampak kepada pergerakan ekonomi di Kabupaten Sleman yang banyak didominasi oleh perkantoran dan bidang industri pengolahan sehingga pendapatan akan lebih domina dan terkonsentrasi terhadap masyarakat yang mempunyai *hard skill* dan *softskill* yang lebih mumpuni .

2. *Politic Stream*

Politic stream atau arus politik dalam perjalanannya terdapat beberapa faktor yang memperngaruhi diantaranya terdapat janji kampanye, partai mayoritas yang ada di DPR/DPRD , pergantian pejabat, referendum publik. Dalam program Lasamba ini dipengaruhi oleh arus pergantian pejabat dimana Bapak Sarastomo Ari Saptoto kepala seksi data kesejahteraan sosial Dinas Sosial Kabupaten Sleman mengusulkan program solusi antara yang aktif,solutiv, dan responsiv sehingga muncul gagasan program bernama Lasamba (Layanan Sambang Warga) dan disetujui oleh Bupati Sleman didalam forum MUSRENBANG KABUPATEN SLEMAN mengingat dengan beberapa alasan karena Pemerintah Kabupaten sleman sendiri sedang melakukan perbaikan yang berbasis data sosial melalui Sistem Layanan Rujukan Terhadap (SLRT). Kabupaten Sleman sendiri merupakan salah satu wilayah uji coba SLRT oleh Kementrian Sosial

sampai dengan tahun 2019 . Sistem SLRT ini adalah sistem dimana akan dilakukan pemetaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat golongan miskin untuk selanjutnya dipadukan dengan layanan sosial yang ada di Kabupaten Sleman . pada perjalanannya karena perbedaan data penerima batan dan perlindungan sosial seringkali mengakibatkan tumpang tindih penerima dan penyaluran yang tidak tepat sasaran Pemerintah Kabupaten Sleman kini tengah melakukan perbaikan data yang berbasis sosial . kemudian dimunculkan gagasan bahwasannya harus ada program kerja yang tidak hanya menunggu masyarakat mendaftarkan diri untuk mendapat dan menerima bantuan maka dari itu muncul program LASAMBA ini sebagai solusi antara program demi terealisasikannya bantuan yang cepat,akurat,tepat kemasyarakat yang membutuhkan

3. Policy stream

Segala bentuk penyelesaian permasalahan di Kabupaten Sleman telah dilakukan dan telah mendapat sorotan dan salah satu bentuk penyelesaian permasalahan membutuhkan program yang responsiv dan solutiv guna mendapatkan aksi yang nyata secara cepat dan tepat. Guna merumuskan alternatif kebijakan dalam masalah sosial, Pemerintah Kabupaten Sleman menggunakan beberapa input-input pendukung didalam prosesnya, yaitu sebagai berikut :

a. Regulasi

- Arah pembangunan Kabupaten Sleman rencana pembangunan didasarkan pada evaluasi hasil kerja dan permasalahan sehingga pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
(bappeda.slemankab.go.id , 2019) .
- Peraturan Bupati Sleman No. 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , Serta tata kerja Dinas Sosial bahasannya Dinas Sosial Memiliki Fungsi dan Tugas untuk memberikan Pelayanan Sosial kepada masyarakat .
- Renstra Kabupaten Sleman 2016-2021,
 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
 2. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian evaluasi pembangunan daerah.
 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-governance dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Dari hasil pembahasan mendapatkan bahwa alternatif kebijakan berupa program jemput bola yang aktif, responsif, dan solutif, adalah program Lasamba (Layanan Sumbang Warga). Dengan mengacu pada landasan hukum Peraturan Bupati Sleman No. 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , Serta tata kerja Dinas Sosial bahasannya Dinas Sosial Memiliki

Fungsi dan Tugas untuk memberikan Pelayanan Sosial kepada masyarakat . Visi dan misi dari program Lasamba (Layanan Sumbang Warga) adalah bersama tanggap dalam memberikan solusi untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan misinya menanamkan budaya responsiv kepada aparatur pemerintahan. Implementasi dari program Lasamba adalah dengan melibatkan TRC (Tim Reaksi Cepat) Dinas Sosial yang berjumlah 25 orang personil yang terdiri dari tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) , pekerja sosial masyarakat (PSM) dan pendamping PKH . bantuan dengan solusi antara ini adalah dapat berupa informasi, aksestabilitas , dan edukasi . dengan sesuai jenis permasalahan yang dialami.

Dengan bekerja sama dengan SKPD terkait dibidang pendidikan akan diarahkan ke Dinas Pendidikan, sementara permasalahan dibidang kesehatan akan memperoleh arahan dan bantuan dari Dinas Kesehatan dan permasalahan sosial sendiri akan ditangani oleh dinas sosial sendiri .